

**HAK MEMPEROLEH PERLINDUNGAN HUKUM  
BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
SELAKU PENYELENGGARA KONTRAK  
PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH  
DALAM BINGKAI NEGARA KESEJAHTERAAN**

**TESIS**

Oleh:

**Yelly Metasari  
201820251004**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA  
JAKARTA  
2020**

## LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Tesis : Hak Memperoleh Perlindungan Hukum Bagi  
Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai  
Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan  
Jasa Pemerintah Dalam Bingkai Negara  
Kesejahteraan

Nama Mahasiswa : Yelly Metasari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251004

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

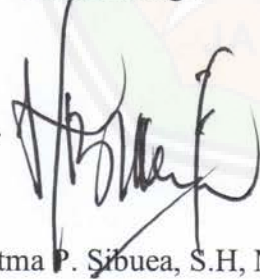
Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara

Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juni 2020

Jakarta, 25 Juni 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Dr. Hotma P. Sibuea, S.H, M.H

NIP 011904085

Pembimbing II



Sabela Gayo, S.H, M.H, Ph.D

NIP 201801006

## LEMBAR PENGESAHAN

Judul Tesis : Hak Memperoleh Perlindungan Hukum Bagi  
Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai  
Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan  
Jasa Pemerintah Dalam Bingkai Negara  
Kesejahteraan

Nama Mahasiswa : Yelly Metasari  
Nomor Pokok Mahasiswa : 201820251004  
Program Studi : Magister Ilmu Hukum  
Program Konsentrasi : Hukum Tata Negara  
Tanggal Lulus Ujian Tesis : 25 Juni 2020

Jakarta, 25 Juni 2020

MENGESAHKAN

Ketua Tim Penguji : Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, SH., MH. .....  
NIDN 0319046403

Penguji I : Dr. Ir. H.M. Hanafi Darwis, SH., S.Pd., MH. .....  
NIDN 0323015604

Penguji II : Dr. Yurnal., SH., MH. .....  
NIDN 0314125804

MENGETAHUI

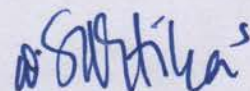
Ketua Program Studi  
Magister Ilmu Hukum



Dr. Lusiana Sulastri, SH., MH.

NIDN 0127117401

Dekan  
Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika, SH., MH., MM

NIDN 0312117102

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **Hak Memperoleh Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Komitmen Sebagai Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Dalam Bingkai Negara Kesejahteraan**. Ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saya mengizinkan tesis ini dipinjam dan digandakan melalui Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Saya memberikan ijin kepada Perpustakaan Universitas Bhayangkara Jakarta Raya untuk menyimpan tesis ini dalam bentuk digital dan mempublikasikannya melalui internet selama publikasi tersebut melalui portal Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Jakarta, 22 Juni 2020

Yang Membuat Pernyataan,



Yelly Metasari

NPM: 201820251004

## ABSTRAK

### **Yelly Metasari, 201820251004, Hak Memperoleh Perlindungan Hukum Bagi Pejabat Pembuat Komitmen selaku Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Bingkai Negara Kesejahteraan.**

Tujuan Penulis meneliti, *Pertama*, untuk mengetahui apakah Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sudah memberikan perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, *Kedua*, untuk mengetahui bagaimanakah bentuktindakan pemerintah dalam rangka memberikan perlindungan hukum kepada PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah, dan *Ketiga*, untuk mengetahui lembaga pemerintah manakah yang berwenang untuk memberikan perlindungan hukum bagi PPK sebagai penyelenggara kontrak pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dan lebih mengutamakan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dalam penelitian ini data yang digunakan mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian dalam bentuk laporan atau jurnal dan sebagainya. Bahan-bahan yang dikaji adalah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Data disusun dalam bentuk uraian kemudian dianalisis secara kualitatif, artinya data ditafsirkan dan didiskusikan berdasarkan teori-teori (doktrin) dan asas-asas serta peraturan hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan.

**Kata kunci:** Perlindungan Hukum, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)

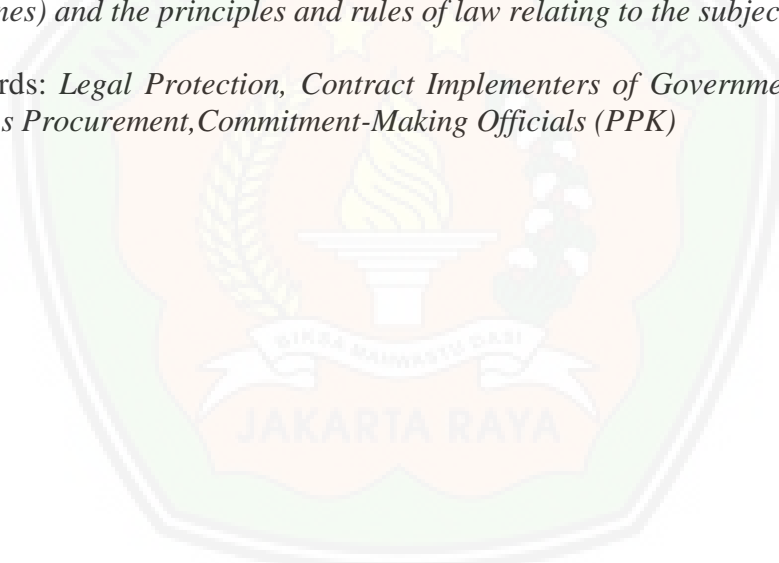
## **ABSTRACT**

**YellyMetasari, 201820251004, *The Right to Obtain Legal Protection for Committing Makers as Contract Implementers of Government Goods and Services Procurement in the Welfare State Frame.***

*The purpose of the author is, Firstly, Has Presidential Regulation No. 16 of 2018 concerning Procurement of Goods / Services provided that the Government already providing legal protection to PPK, Secondly, How is the form of government action in the context of providing legal protection to PPK, Thirdly, Which government agency is authorized to serve legal protection for PPK.*

*This dissertation used a normative juridical research method and prioritized secondary data obtained from library studies. In this study, the data used include official documents, books, reports of the research in the form of reports or academic journals. The materials studied are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data compiled in narrative form and then analyzed qualitatively means that data is interpreted and discussed based on the theories (doctrines) and the principles and rules of law relating to the subject matter.*

**Keywords:** *Legal Protection, Contract Implementers of Government Goods and Services Procurement, Commitment-Making Officials (PPK)*



## KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji syukur kehadiran Allah SWT, atas segala karunia dan ridho-NYA, sehingga tesis dengan judul “**Hak Memperoleh Perlindungan Hukum Bagi Penyelenggara Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dalam Bingkai Negara Kesejahteraan**” ini dapat diselesaikan. Oleh karena itu, pada kesempatan ini Penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada :

1. Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Bapak, Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H, M.M.
2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, Ibu Dr. Ika Saimima, S.H, M.H.
3. Ketua program studi Pascasarjana Ilmu Hukum, Bapak Dr. Awaludin Marwan, S.H., M.H.,M.A yang telah membantu dan menyetujui usulan judul Tesis penulis.
4. Pembimbing I, BapakDr. Hotma P Sibuea, S.H.,M.H. atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi.
5. Pembimbing II, Bapak Sabela Gayo, S.H.,M.H., Ph.D atas bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan kepada penulis untuk berdiskusi.
6. Bapak Dr. H. Erwin Owan Hermansyah, S.H., M.H dan Ibu Dr. Ika Saimima, S.H, M.H sebagai penguji, yang telah memberikan masukan dan saran pada saat seminar proposal tesis.
7. Seluruh Dosen PascasarjanaIlmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami IlmuHukum.
8. Rekan – rekan Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Angkatan XX Tahun 2018, khususnya dari kelas HTN yaitu Ibu Siti Opih dan Bapak Yudi. Kemudian, Bapak Arifin sebagai ketua kelas, Ibu Tiara, Ibu Antin, Bapak Ivan, Bapak Slamet, Bapak Sarino, Bapak Kukuh, Bapak Agi, Bapak Budi, Bapak Untung, Bapak Putu dan Ibu Lucy yang selalu memberikan semangat untuk segera menyelesaikan tesis ini.

9. Bapak/Ibu di Sekretariat Program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, atas bantuannya selama Penulis menjadi mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
10. Pimpinan dan Rekan – rekan kerja di Bagian Pemilihan dan Asistensi Pengadaan Biro Manajemen BMN dan Pengadaan Kementerian Keuangan yang telah memberikan dukungan kepada Penulis untuk menyelesaikan program studi Magister Ilmu Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya .
11. Kedua orang tuaku, Bapak Yulidasman dan Ibu Muharni, Suamiku Okta Syaif Putra, S.H, M.PP, Anakku Jasmine Okly Zhafirah dan adik-adik ku Lina, Yolanda, Yudi dan Ica yang telah memberikan doa dan dukungan setulus hati dalam menyelesaikan studi program Pascasarjana, semoga ilmu yang penulis dapatkan bermanfaat bagi keluarga.
12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang. Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.

Jakarta, 22Juni 2020

Yelly Metasari



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Masalah .....	1
1.2. Batasan Masalah .....	12
1.3. Identifikasi Masalah .....	13
1.4. Rumusan Masalah .....	14
1.5. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	14
1.6. Kerangka Teori .....	15
1.7. Metode Penelitian.....	22
1.8. Sistematika Penelitian.....	27
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
2.1. Asas Negara Hukum .....	29
2.2. Teori Perlindungan Hukum.....	52
2.3. Teori Kewenangan.....	60

<b>BAB III PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PPK SEBAGAI PENYELENGGARA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH MENURUT PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TENTANG PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH .....</b>	<b>50</b>
<b>JASA PEMERINTAH .....</b>	<b>50</b>
3.1. Tinjauan Umum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	80
3.2. Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	
3.3. Urgensi Pembaharuan Regulasi Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada Pelaku Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah.....	<b>88</b>
<b>BAB IV BENTUK TINDAKAN PEMERINTAH DAN LEMBAGA PEMERINTAH YANG BERWENANG UNTUK MEMBERIKAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN SEBAGAI PENYELENGGARA KONTRAK PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH.....</b>	<b>90</b>
4.1. Bentuk Tindakan Pemerintah Dalam Rangka Memberikan Perlindungan Hukum Kepada PPK Sebagai Penyelenggaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	<b>90</b>
4.2. Lembaga Pemerintah Yang Berwenang Untuk Memberikan Perlindungan Hukum Kepada PPK Sebagai Penyelenggaran Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah .....	<b>110</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	
5.1. Simpulan.....	<b>117</b>
5.2. Saran .....	<b>117</b>
	<b>117</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	
<b>RIWAYAT HIDUP .....</b>	
	<b>120</b>
	<b>126</b>